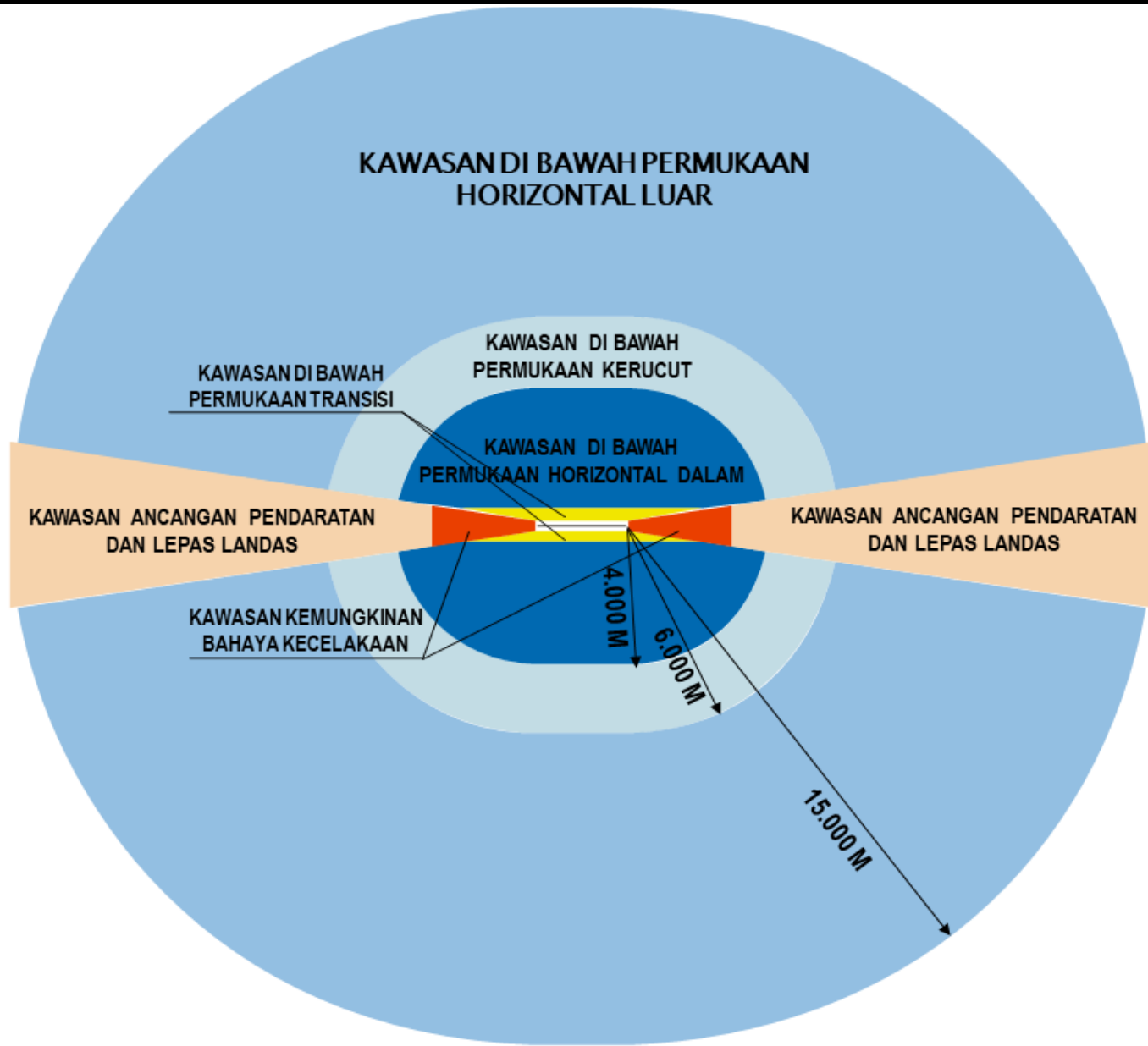


ILUSTRASI DUA DIMENSI KKOP



ATURAN DASAR

MATERI WAJIB

Ketentuan khusus, dg komponen antara lain meliputi:

- f) ...
- g) kawasan cagar budaya;
- h) kawasan resapan air;
- i) kawasan sempadan;
- j) kawasan pertahanan dan keamanan (hankam);
- k) kawasan karst;
- l) kawasan pertambangan mineral dan batubara;
- m) kawasan migrasi satwa; dan
- n) ruang dalam bumi

Ketentuan khusus dapat menganulir aturan yang ada pada aturan dasar sesuai dengan tuntutan kekhususannya.

ATURAN DASAR

MATERI WAJIB

6

Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ yang terdiri atas:

a) **Ketentuan variansi pemanfaatan ruang** yang merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar antara lain *transfer of development rights* (TDR) dan *air right development* yang dapat diatur lebih lanjut dalam RTBL.

b) ...

ATURAN DASAR

MATERI WAJIB

Ketentuan Pelaksanaan terdiri atas:

a) ...

b) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

c) ...

ATURAN DASAR

MATERI WAJIB

Ketentuan Pelaksanaan terdiri atas:

a) ...

b) ...

c) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.

Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/ peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

d) ...

ATURAN DASAR

MATERI WAJIB

Ketentuan Pelaksanaan terdiri atas:

a) ...

b) ...

c) ...

d) Aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "*legal nonconforming use*" atau persetujuan "*conditional use*."

MUATAN PERATURAN ZONASI

Peraturan zonasi memuat:

- Aturan Dasar; dan
- Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ).

Setelah diuraikan tentang Aturan Dasar di depan,
berikut ini tentang Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ).

LIHAT VIDEO

20220523 TGPL22 - 8 PERATURAN ZONASI Zoning Maps